

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perusahaan mempunyai kewajiban untuk menyusun serta mempublikasikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas situasi keuangan yang terjadi selama satu periode. Termasuk pula sistem pemerintahan yang bergerak di bagian publik untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas telah dilaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Laporan keuangan yaitu media suatu entitas pada pemerintahan yang digunakan untuk menjelaskan kinerja keuangannya kepada publik (Badjuri & Elisa, 2004). Pemerintah berkewajiban untuk menyediakan laporan keuangan yang berkualitas untuk dapat memudahkan publik dalam memahami makna dari laporan keuangan yang telah disusun tersebut.

Dalam ayat suci Al-Quran telah disebutkan bahwa Islam telah menerapkan sistem pencatatan yang penekanannya terhadap kebenaran, kejujuran dan keadilan, sebagaimana tercantum pada Alquran surah An-Nisa ayat 58 dijelaskan sebagai berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaikbaiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (Q.S.An-Nisa’:58)

Dalam uraian ayat tersebut ada kaitanya dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah bahwa hendaklah kita menuliskannya dengan benar tanpa memanipulasi besar atau kecilnya laporan dan penggunaan anggaran seperti apa yang seharusnya pencatatan pengelolaan laporan keuangan pada pemerintah daerah. Transaksi harus ada bukti serta data yang dicatat sesuai dengan standar dan pertanggungjawaban yang sudah ditentukan. Sebagai bentuk dari pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah, Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan kepada para stakeholder, antara lain DPRD dan masyarakat umum. Undangundang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 31 ayat (1), mewajibkan Gubernur/ Bupati/ Walikota untuk memaparkan rancangan perda terkait pertanggungjawaban dalam pelaksanaan APBD kepada DPRD yakni laporan keuangan yang sudah diperiksa oleh BPK, maksimal 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berkaitan dengan kualitas laporan keuangan, fenomena yang terjadi atas buruknya pengelolaan laporan keuangan pada pemerintah daerah, kementerian dan Lembaga negara diungkapkan oleh Wakil ketua BPK RI bahwa Kementerian dan Lembaga yang masih menerima opini di bawah WTP bisa saja memperbaiki laporan

dan penggunaan anggaran. Hal ini harus didukung dengan adanya komitmen, rencana yang jelas (action plan), mekanisme kontrol, dan pejabat yang ditugaskan fokus dalam perbaikan laporan keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tiap periodenya mendapat komentar berupa opini oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK). Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan menolak memberi Opini atau tidak Memberi Pendapat (TMP). Laporan keuangan memainkan peran yang sangat penting dalam mengkomunikasikan kesehatan keuangan dan kinerja suatu entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik itu pemegang saham, kreditor, regulator, maupun masyarakat umum. Prinsip-prinsip seperti relevansi, keandalan, kemudahan pemahaman, dan kemampuan untuk dibandingkan sangatlah penting dalam memastikan bahwa laporan keuangan memberikan gambaran yang akurat dan bermakna tentang posisi keuangan dan hasil kinerja suatu entitas.

PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menegaskan pentingnya kualitas informasi dalam laporan keuangan pemerintah. Relevansi mengacu pada seberapa pentingnya informasi tersebut bagi pengambilan keputusan, keandalan menunjukkan tingkat kepercayaan yang dapat diberikan terhadap informasi tersebut, kemudahan pemahaman menggambarkan kemampuan penerima informasi untuk memahami isi laporan, dan kemampuan dibandingkan menjamin bahwa informasi tersebut dapat

dianalisis dan dibandingkan dengan periode sebelumnya atau dengan entitas lain.

Dengan memastikan bahwa laporan keuangan memenuhi kriteria-kriteria tersebut, pemerintah dapat memastikan bahwa informasi yang disampaikan benar-benar memberikan gambaran yang akurat dan berguna bagi pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan yang tepat. Pada kondisi sekarang, banyak permasalahan yang terjadi berkaitan dengan laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Masih banyak data-data laporan keuangan yang disajikan jauh dari kenyataan. Terdapat penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. Kabupaten Bantul menjadi objek penelitian karena adanya kasus suap Wakil Bupati Bantul terkait proyek pembangunan Kampus Kristen Duta Wacana (KKDW) dan perizinan di Kabupaten Bantul senilai Rp 300 pada tahun 2022 juta tutur Dewan Pimpinan Pusat *Corruption Investigation Commiittee* (CIC).

Di akhir Tahun 2022 juga terdapat kasus korupsi biaya Perawatan dan anggaran peralatan dan jasa kebersihan Stadion Sultan Agung Bantul oleh Disdikpora. Jogja Corruption Watch (JCW) menuturkan bahwa kerugian yang di tafsir sebesar Rp 800 juta yang bersumber dari APBD Kabupaten Bantul tahun 2020-2021 serta JCW mempertanyakan hasil audit penghitungan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY. Maka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) menegaskan, opini wajar tanpa pengecualian (WTP), bukan jaminan tidak ada masalah keuangan. Itu menyusul dugaan

korupsi perawatan Stadion Sultan Agung (SSA) oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bantul. Padahal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul sudah berturut-turut terima opini WTP BPK sejak tahun 2013-2022. Jadi bukan jaminan mutlak, (pemerintahan dengan opini WTP BPK) ini *zero defect* atau tidak ada kesalahan. Walaupun hasil opini selalu WTP berturut-turut, permasalahan dari eksternal pun tetap ada (Kepala BPK Perwakilan Daerah Istimewa Jogjakarta).

Lalu untuk mempertahankan opini WTP setiap pemerintah daerah dihimbau untuk menyusun LKPD berdasarkan kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundangundangan serta memperhatikan tertib administrasi dan pengelolaan mulai dari tingkat desa, serta adanya transparansi terhadap informasi keuangan. Pemerintah Kabupaten Bantul sendiri sudah memperoleh WTP dari BPK akan tetapi WTP ini tidak menjamin bahwa laporan keuangan bebas dari kecurangan karena menurut Sunarto Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi DIY, menjelaskan bahwa opini WTP bukan tujuan akhir dari pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban bebas dari kecurangan, Opini WTP tidak menyimpulkan bahwa SPI telah berjalan secara efisien dan ekonomis. Tercapainya WTP ini tidak menjamin bahwa tahun-tahun yang akan datang BPK juga memberikan opini WTP atas LKPD.

Berdasarkan fenomena tersebut dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah masih jauh dari kriteria karakteristik laporan keuangan yang disyaratkan, diantaranya keterandalan dan ketepatanwaktuan.

Mengingat bahwa keterandalan dan ketepatanwaktuan merupakan unsur penting dalam laporan keuangan OPD sebagai dasar pengambilan keputusan. Keterandalan merupakan kemampuan informasi untuk memberikan keyakinan bahwa informasi tersebut benar dan valid. Ketepatanwaktuan merupakan tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi itu kehilangan kekuatan untuk memengaruhi keputusan (Nurillah, 2014). Demi terselenggarakannya keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan yang baik, maka harus ada akuntabilitas, transparansi, dan kinerja yang sesuai. Maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam hal-hal yang dapat memengaruhi keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan OPD.

Hal tersebut dirasa menarik bagi peneliti untuk melihat seberapa jauh hal tersebut bisa terjadi. Peneliti berusaha untuk mengetahui bagaimana hal tersebut bisa terjadi beserta faktor-faktor yang mempengaruhi seperti prinsip akuntabilitas, prinsip transparansi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, sehingga berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan oleh Kabupaten Bantul. Peneliti memilih variabel akuntabilitas dikarenakan dengan adanya prinsip akuntabilitas akan tercipta suatu pertanggungjawaban dari pemerintah berupa penerbitan laporan keuangan pemerintah daerah terhadap masyarakat yang telah memberikan wewenang untuk kepentingan tersebut (Vidyasari dan Suryono, 2021) pada penelitian terdahulu mengatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif pada kualitas dari laporan keuangan pemerintah daerah.

Transparansi karena dengan adanya prinsip transparansi akan tercipta suatu kepercayaan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat melalui tersedianya informasi, menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang pasti dan memadai, dalam hal ini dengan menerbitkan laporan keuangan pemerintah daerah. Transparansi merupakan suatu keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, oleh karena itu transparansi merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam proses penerbitan laporan keuangan pemerintah daerah. Akuntabilitas dan transparansi termasuk ke dalam prinsip Good Government Governance (GGG) yang menjadi acuan tata kelola pemerintahan termasuk dalam membuat LKPD. (Putri dan Akbar, 2022) menyatakan pada penelitian sebelumnya bahwa transparansi tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kompetensi sumber daya manusia dipilih dengan alasan berisi faktor-faktor akuntansi yang digunakan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah sehingga merupakan faktor penting baik untuk meningkatkan kualitas atau pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah tersebut. penelitian terdahulu (Pebriani, 2019) menyatakan bahwa kompetensi sdm secara parsial berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd), begitu juga kompetensi sdm yang dimoderasi oleh sistem pengendalian pemerintahan (spip) berpengaruh signifikan terhadap kualitas lkpd.

Sistem Pengendalian Internal (SPI) sebagai pemoderasi dengan alasan dapat memediasi akuntansi, transparansi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Alasan menurut dugaan pertama sesuai dengan fungsi sistem pengendalian internal yang dikatakan yaitu sebagai pengendali dan pengaturan sistem pemerintah dalam mengelola penerimaan dan penggunaan dana secara transparan, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Fungsi sistem pengendalian internal tersebut sejalan dengan tujuan adanya kompetensi sumber daya manusia dan sistem informasi akuntansi yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan dapat dipertanggungjawabkan. Fungsi sistem pengendalian internal tersebut sejalan dengan tujuan adanya kompetensi sumber daya manusia dan sistem informasi akuntansi yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan keuangan serta dapat memperbaiki kualitas laporan keuangan. Fungsi ini sejalan dengan fungsi sistem pengendalian internal membuat peneliti menduga bahwa kualitas laporan keuangan akan semakin baik, yang dapat dilihat dari hasil audit BPK. Dalam hal ini, tujuan utama untuk keterandalan pelaporan keuangan sehingga jika suatu organisasi pemerintahan daerah ingin mewujudkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang baik, maka harus memiliki sistem pengendalian internal yang baik pula. Pada penelitian terdahulu (Widari, 2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian yang diteliti berjudul **“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Kompetensi Sumber Daya**

Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dimoderasi oleh Sistem Pengendalian Internal (Survey Empiris pada OPD di Kabupaten Bantul)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pada penelitian ini, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah prinsip akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bantul?
2. Apakah prinsip transparansi berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bantul?
3. Apakah pemahaman kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bantul?
4. Apakah sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh antara prinsip akuntabilitas dengan kualitas LKPD di Kabupaten Bantul?
5. Apakah sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh antara prinsip transparansi dengan kualitas LKPD di Kabupaten Bantul?
6. Apakah sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh antara pemahaman kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas LKPD di Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah prinsip akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Untuk mengetahui apakah prinsip transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Untuk mengetahui apakah pemahaman kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
4. Untuk mengetahui apakah SPI berpengaruh positif terhadap pengaruh antara prinsip akuntabilitas dengan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
5. Untuk mengetahui apakah SPI berpengaruh positif terhadap pengaruh antara prinsip transparansi dengan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
6. Untuk mengetahui apakah SPI berpengaruh positif terhadap pengaruh antara pemahaman kompetensi sumberdaya alam dengan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

D. Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dalam bidang pendidikan dan dapat menambah wawasan kepada masyarakat agar lebih

paham mengenai kinerja pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut adalah manfaat penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi orang lain dalam bidang akuntansi khususnya akuntansi sektor publik, dan juga dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya jika ingin mengembangkan penelitian lebih lanjut pada bidang kinerja OPD pemerintahan daerah

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis

Menambahkan pengetahuan dan pemahaman dalam bidang akuntansi sektor publik khususnya terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja OPD.

2) Bagi OPD Kabupaten Bantul

Menambah informasi dan referensi terkait apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja OPD di Kabupaten Bantul lalu dapat meningkatkan kualitas kinerja OPD tersebut.

3) Bagi Masyarakat

Menambah informasi kepada masyarakat terkait dengan transparansi pelaporan keuangan yang kemudian informasi tersebut dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja OPD daerah Kabupaten Bantul.